

PERAN BALI *DEMOCRACY FORUM* (BDF) DALAM MENGHADAPI BERBAGAI TANTANGAN DEMOKRASI DI ASIA PASIFIK (2008-2014)

Oleh :

Maria Adisti¹

NIM. E1111171009

Jumadi², Ori Fahriansyah²

surel: mariaadisti@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan peran dari institusi internasional berupa Bali *Democracy Forum* (BDF) dalam menghadapi berbagai tantangan demokrasi di Kawasan Asia Pasifik pada tahun 2008 hingga 2014. Demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam penyelenggaraan demokrasi, terdapat banyak aspek di dalamnya, seperti sosial, politik, ekonomi dan aspek lainnya yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Pada praktiknya di Asia Pasifik, demokrasi tidak terlepas dari berbagai tantangan dan masalah sehingga diperlukan solusi untuk mengahadapinya. Masalah tersebut dapat berupa masalah internal suatu negara dalam tubuh pemerintahannya, masalah hak asasi manusia, keamanan, perdamaian, isu transnasional dan masalah lainnya. Sebagai sebuah institusi yang bergerak pada demokrasi, Bali *Democracy Forum* (BDF) memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan demokrasi yang lebih baik di kawasan Asia Pasifik dengan mengedepankan sifat inklusif. BDF sebagai sebuah institusi berusaha untuk menjalankan perannya dalam membangun demokrasi di kawasan yang dilakukan melalui forum tahunan yang dimulai pada tahun 2008, termasuk melalui berbagai program lainnya. Untuk mengetahui peran BDF sebagai sebuah institusi, peneliti menggunakan Teori Neoliberalisme Institusional oleh Robert O. Keohane (1989) dan konsep demokrasi yang tertuang dalam *Three Founding Pillars* oleh PBB, yakni *peace and security*, *human rights* dan *development*. Melalui analisis yang dilakukan, diketahui bahwa BDF telah menjalankan perannya, yakni menyediakan aliran informasi dan kesempatan negosiasi, memperkuat harapan yang muncul tentang kesolidan dan kesepakatan internasional, dan meningkatkan kemampuan pemerintah memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri.

Kata Kunci: Bali *Democracy Forum* Asia Pasifik; Tantangan Demokrasi; Teori Neoliberalisme Institusional

Abstract

This research is a descriptive study with a qualitative approach that described the roles of an international institution, the Bali Democracy Forum (BDF) in facing various challenges of democracy in the Asia Pacific Region from 2008 to 2014. Democracy is a form of government in which the ultimate power is in the hands of the people. In the implementation of democracy, there are many aspects, such as social, political, economic, and other aspects related to state life. In practice in the Asia Pacific, democracy cannot be separated from various challenges and problems so that solutions are needed to deal with them. These problems can be in the form of internal problems of a country within its government, human rights issues, security, peace, transnational issues, and other problems. As an institution that is engaged in democracy, the Bali Democracy Forum (BDF) has a goal to create a better democratic life in the Asia Pacific region by promoting an inclusive nature. The BDF as an institution strives to carry out its role in building democracy in the region through an annual forum that began in 2008, including through various other programs. To find out the roles of BDF as an institution, this study used Robert O. Keohane's Institutional Neoliberalism Theory (1989) and the democracy concept contained in the Three Founding Pillars by the United Nations, namely peace and security, human rights, and development. The results showed that the BDF had fulfilled its role in providing a flow of information and negotiation opportunities, reinforcing emerging expectations of international cohesion and agreement, and enhancing the government's ability to monitor other powers and implement its own commitments.

Keywords: *Bali Democracy Forum; Asia Pacific; Democracy Challenges; Institutional Neoliberalism Theory*

A. Pendahuluan

Sejak Indonesia merdeka, berbagai upaya dilakukan oleh presiden Indonesia untuk menstabilkan kehidupan berdemokrasi di Indonesia, tidak terkecuali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang dikenal dengan SBY yang secara resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. Situasi Indonesia yang belum kondusif menjadi catatan penting bagi era kepemimpinan SBY. Salah satu hal yang menjadi prioritas utama pada masa kepemimpinan SBY adalah menciptakan negara yang demokratis (Prasetyo, 2018).

Melihat kondisi demokrasi Indonesia yang belum stabil, lahir sebuah forum yang didirikan dalam menciptakan demokrasi yang lebih baik dari sebelumnya, yakni melalui sebuah forum yang dinamai dengan “Bali Democracy Forum (BDF)”. Forum tersebut secara resmi berdiri pada tahun 2008 di akhir periode pertama pemerintahan SBY.

BDF difokuskan di kawasan Asia Pasifik dimana Indonesia melihat bahwa pelaksanaan demokrasi di kawasan Asia-Pasifik masih tergolong rendah sehingga hak asasi manusia dan isu setara lainnya tertinggal. Pemerintah negara di kawasan Asia-Pasifik terlihat lebih gencar dalam pembangunan ekonomi sehingga

pembangunan penting lainnya terkesan terlantarkan padahal seluruh komponen penting untuk dibangun dan harus dapat berjalan secara beriringan (Anggraeni dan Indrawati, 2020).

Table 3

Democracy across the regions

	Number of countries	Democracy Index average	Full democracies	Flawed democracies	Hybrid regimes	Authoritarian regimes
North America						
2006	2	8.64	2	0	0	0
2008	2	8.64	2	0	0	0
West Europe						
2006	21	8.60	18	2	1	0
2008	21	8.61	19	1	1	0
Eastern Europe						
2006	28	5.76	2	14	6	6
2008	28	5.68	2	14	6	6
Latin America & the Caribbean						
2006	24	6.37	2	17	4	1
2008	24	6.43	2	18	3	1
Asia & Australasia						
2006	28	5.44	3	12	4	9
2008	28	5.58	4	10	8	6
Middle East & North Africa						
2006	20	3.53	0	2	2	16
2008	20	3.54	0	1	3	16
Sub-Saharan Africa						
2006	44	4.24	1	7	13	23
2008	44	4.28	1	6	15	22
Total						
2006	167	5.52	28	54	30	55
2008	167	5.55	30	50	36	51

Tabel 1

Indeks Demokrasi Kawasan

(Sumber: *Economist Intelligence Unit, 2008*)

Dari tabel indeks demokrasi kawasan di atas, dapat dilihat bahwasanya kawasan Asia Pasifik masih berada di urutan yang cukup rendah dibanding wilayah lain. Pada tahun 2008, indeks demokrasi Asia dan Australasia berada di angka 5.58 dan berbeda jauh dengan Amerika Utara dengan angka 8.64. Perhitungan indeks demokrasi yang dilakukan oleh *Economist Intelligence Unit* (EIU) tersebut berdasarkan dari proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintah, partisipasi politik,

dan budaya politik (*Economist Intelligence Unit* 2008, 10).

Dalam BDF, terdapat berbagai tema yang diangkat terkait demokrasi dan seluruh fokus pembahasan forum tersebut merupakan cerminan dari *Three Founding Pillars* yang ada di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (bdf.kemlu.go.id, 2020). Ketiga pilar tersebut antara lain: *peace and security*, *human rights* dan *development* (Gov.UK., 2015).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan, penelitian yang akan dilakukan ini termasuk ke dalam penelitian baru yang dilakukan terkait peran dari *Bali Democracy Forum (BDF)* sebagai sebuah institusi. Adapun tiga penelitian tersebut memiliki perbedaan dan persamaan hingga relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu pertama ditulis oleh Yolla Anggraeni dan Indrawati pada tahun 2020 dengan judul “Diplomasi Publik Indonesia Melalui *Bali Democracy Forum* sebagai Bagian Dari Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia” (Anggraeni dan Indrawati, 2020). Selanjutnya, terdapat penelitian terdahulu dengan judul “*Indonesian Interest in Bali Democracy Forum (BDF)*” oleh Wilyam Lie dan Muhnizar Siagian (Lie dan Siagian, 2018). Terakhir,

penelitian oleh Vanny El Rahman (2017) dengan judul “Pengaruh *Bali Democracy Forum* terhadap Transisi Demokrasi Myanmar Periode 2012-2014”.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat persamaannya dalam mengangkat *Bali Democracy Forum* sebagai sebuah institusi, namun masing-masing pembahasan memiliki fokus penelitian yang berbeda, termasuk teori yang digunakan. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian yang memiliki kebaruan dalam pembahasannya dimana akan memfokuskan pada peran BDF dalam menghadapi berbagai tantangan demokrasi di Asia Pasifik pada tahun 2008-2014.

Melihat berbagai pemaparan di atas tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang peranan BDF sebagai sebuah institusi untuk menghadapi berbagai tantangan demokrasi bersama di Asia Pasifik yang secara khusus terjadi pada tahun 2008 hingga 2014. Pada kurun tahun tersebut, terdapat banyak gejolak dalam kehidupan demokrasi di Asia Pasifik yang menjadi pembahasan dalam *Bali Democracy Forum*.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Unit analisis

dari penelitian ini adalah aktor negara, yakni sebuah institusi berupa Bali Democracy Forum (BDF) yang setiap pertemuannya diwakili oleh perwakilan resmi masing-masing negara yang hadir. Objek penelitian ini adalah peran BDF dalam menghadapi berbagai tantangan bersama di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2008-2014.

Mengenai analisis data, peneliti menggunakan teknik keabsahan data melalui triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data ini dilakukan untuk menguji kredibilitas yang dilakukan dengan cara mengecek data melalui berbagai sumber. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman dimana terdapat beberapa tahapan setelah pengumpulan data, yakni berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono 2017, 247).

Teori yang digunakan adalah Teori Neoliberalisme Institusional oleh Robert O. Keohane (1989). Dalam hal ini, Keohane melihat teori ini sebagai teori yang menekankan kemungkinan kerja sama dalam hubungan antarnegara dan menjelaskannya tidak hanya dalam hal kepentingan bersama, tetapi juga menjelaskannya melalui berbagai peran institusi, lingkungan yang terikat aturan

dimana interaksi antar negara dapat terjadi dan terdapat keterkaitan antara aktor dalam sistem internasional (Keohane, 1989). Adapun perandari institusi adalah:

1. Menyediakan aliran informasi dan kesempatan negosiasi
2. Meningkatkan kemampuan pemerintah memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri
3. Memperkuat harapan yang muncul tentang kesolidan dan kesepakatan internasional

C. Pembahasan

Pelaksanaan Bali Democracy Forum

1) Bali Democracy Forum I

Tema yang diangkat pada BDF I adalah “*Building and Consolidating Democracy as Agenda for Asia*”. Adapun tujuannya dari forum pertamainiialah memfokuskan untuk membangun kedekatan agar tercipta rasa nyaman di antara negara yang terlibat dan menyatukan pendapat bahwa demokrasi menjadi agenda strategis regional.

Pada forum tersebut, Australia menyampaikan pengalamannya mereformasi kebebasan informasi, reformasi UU tentang sumbangan politik dan pendanaan politik. Kemudian, Brunei memaparkan masalah pangan dan energi,

aspek buatan masalah tentang masalah iklim dan krisis keuangan. Timor Leste menyatakan bahwa dunia sedang mengalami krisis makanan dan energi. Saatitu pula Timor Leste sedang menghadapi berbagai gejala dalam menghadapi terorisme. Hal serupa juga dialami oleh Sri Lanka. Perwakilan Malaysia menyatakan bahwa adanya ancaman berupa senjata pemusnah massal yang dimiliki oleh Iraq. Hal itu harus dihadapi secara bersama agar dapat tercipta rasa aman di kawasan (BDF I, 2008).

2) *Bali Democracy Forum II*

Tema yang diangkat pada BDF II adalah *"In Search of Synergy: Democracy, Rule of Law, and Development"*. Adapun tujuannya ialah mencari sinergi dalam demokrasi, penegakan hukum dan pembangunan.

Pada forum tersebut, Jepang menyatakan kekhawatirannya mengenai nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara yang dapat berdampak pada kestabilan kawasan. Kemudian, Maldives menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak serta merta membawa pembangunan demokrasi, tetapi kemiskinan pasti memengaruhi demokrasi (BDF II, 2009).

3) *Bali Democracy Forum III*

Tema yang diangkat adalah *"Democracy and the Promotion of Peace and Stability"*. Demokrasi dijadikan jembatan dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Masalah yang cukup disoroti adalah mengenai alur informasi di media social yang dapat membawa dampak positif dan negatif. Selainitu, kondisi social dimana adanya kebencian terhadap agama, ras, dan bangsa telah menjadi tantangan bersama, termasuk juga mengenai kerusakan lingkungan alam (BDF III, 2010).

4) *Bali Democracy Forum IV*

Tema yang diangkat adalah *"Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices"*. Forum keempat ini berusaha untuk membuka kesempatan bagi aspirasi rakyat. Adapun masalah yang dibahas adalah tantangan negara berkembang mengenai cara saling pengertian dimana masyarakat juga harus dapat menyadari bahwa ia merupakan bagian dari pembangunan. Akses masyarakat terhadap informasi pemerintah juga menjadi penting (BDF IV, 2011).

5) *Bali Democracy Forum V*

Tema yang diangkat adalah *"Advancing Democratic Principles at the Global Setting: How Democratic*

Global Governance Contributes to International Peace and Security, Economic Development, and Effective Enjoyment of Human Rights". Forum ini bertujuan untuk mempromosikan prinsip demokrasi; perdamaian, keamanan dan pembangunan. Adapun masalah yang disoroti adalah bahwa pelaksanaan HAM harus dapat dilaksanakan diluar batas negara dalam mencapai 3 prinsip tersebut. Selain itu, penting untuk meningkatkan taraf pendidikan dan hak wanita. Tata global yang efektif juga menjadi catatan penting (BDF V, 2012).

6) **Bali Democracy Forum VI**

Tema yang diangkat adalah "*Consolidating Democracy in a Pluralistic Society*". Tujuannya ialah mengkonsolidasikan demokrasi di keadaan masyarakat yang pluralistic. Adapun salah satu hasil dari forum tersebut ialah memperlihatkan Indonesia sebagai negara yang plural dimana keadaan tersebut dapat membawa dampak negatif dan positif. Salah satu masalah yang ada dalam negara yang plural adalah adanya konflik antar masyarakat mengenai perbedaan mereka satu sama lain (BDF VI, 2013).

7) **Bali Democracy Forum VII**

Tema yang diangkat ialah "*Evolving Regional Democratic*

Architecture: The Challenges of Political Development, Public Participation, and Socio-Economic Progress in the 21st Century". Adapun tujuannya ialah memfokuskan tentang bagaimana negara-negara yang terlibat dapat membangun cara lain yang efektif dan tepat dalam membangun demokrasi (ANTARANEWS, 2014).

Adapun hasil dari forum tersebut ialah pernyataan bahwa demokrasi tanpa pembangunan politik adalah demokrasi yang terhenti. Demokrasi tanpa perkembangan sosial ekonomi adalah demokrasi yang tidak hidup pada ekspektasi masyarakat. Korupsi dan kemiskinan merupakan tantangan bersama yang mana negara harus dapat mengatasinya secara efektif (Setkab.go.id, 2014).

Analisis Teori Neoliberalisme Institusional Terhadap Peran Bali Democracy Forum (BDF)

1) **Menyediakan Aliran Informasi dan Kesempatan Negosiasi**

Bali Democracy Forum sebagai sebuah institusi telah menjalankan tugasnya dalam menyediakan aliran informasi dan kesempatan negosiasi. Dalam hal ini, aliran informasi diberikan ketika forum tersebut diselenggarakan. Setiap negara yang hadir dapat bertukar

informasi melalui diskusi yang dilakukan. Pada forum yang dilaksanakan, masing-masing negara memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya serta pengalamannya dalam berdemokrasi. Perwakilan negara yang hadir diberikan kesempatan untuk menceritakan kondisi negaranya serta pandangannya terhadap tema yang diangkat.

Negara yang hadir mendapatkan informasi seputar kegiatan yang dilakukan oleh negara lain melalui forum diskusi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya aliran informasi yang terdapat pada pelaksanaan Bali Democracy Forum sebagai sebuah forum tahunan yang dimulai dari tahun 2008. Hal ini tentu penting bagi setiap negara yang hadir untuk dapat mengetahui sejumlah informasi terhadap perkembangan demokrasi. Masing-masing negara dapat saling bertukar informasi dan menjadikannya sebagai sebuah pengetahuan untuk dapat dijadikan sebagai masukan dalam perkembangan demokrasi.

BDF sebagai sebuah institusi tidak berdiri sendiri. Dalam memperkuat perannya, telah didirikan *Institute for Peace and Democracy* (IPD). IPD berfungsi sebagai badan untuk merealisasikan sejumlah ide yang didapatkan melalui pelaksanaan BDF itu sendiri. Melihat berbagai tantangan

demokrasi yang ada di Asia Pasifik, BDF memerlukan badan khusus yang akan mengerjakan sejumlah program dalam rangka untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Maka dari itu, IPD hadir untuk merealisasikan segala ide yang telah disampaikan oleh berbagai negara dalam mencapai demokrasi yang lebih baik. IPD juga hadir dalam bentuk *website* yang dapat dijangkau oleh publik. Hal ini tentu akan dapat memudahkan public menjangkau informasi mengenai perkembangan program dalam memajukan demokrasi.

Gambar 1 Website Resmi *Institute for Peace and Democracy*



(Sumber: *Institute for Peace and Democracy*, 2021)

IPD yang telah dibentuk pada tahun 2008 tersebut juga telah aktif mengadakan berbagai kegiatan, diantaranya adalah berupa seminar, pertemuan kelompok ahli, dialog antar pakar, serta kerja dalam pengkajian (BDF II, 8). Segala bentuk kegiatan tersebut

tentu berkaitan dengan tantangan demokrasi yang dihadapi secara bersama di kawasan Asia Pasifik.

Masalah utama yang dihadapi oleh negara di Asia Pasifik dalam demokrasi adalah masalah sosial, politik, ekonomi dan lingkungan. Kemiskinan dan kesejahteraan merupakan masalah yang umum dihadapi oleh negara di Asia Pasifik. Sebagaimana terdapat cukup banyak negara berkembang di Asia Pasifik, maka masalah sosial seperti kesejahteraan, butahuruf, dan kemiskinan masih banyak terjadi hingga saat ini. Ketidakstabilan dalam bidang politik dan ekonomi juga menjadi tantangan terbesar bagi sebagian negara di Asia Pasifik. Ketidakstabilan politik dan ekonomi dalam hal ini dinilai sangat memengaruhi satu sama lain. Kondisi ekonomi suatu negara yang tidak stabil dianggap sangat memengaruhi kondisi politik domestik negara tersebut. Hal ini telah disampaikan dalam pertemuan BDF. Selain itu, isu lingkungan juga tidak kalah penting untuk dibicarakan dalam forum tersebut. Perubahan iklim dan berbagai bencana alam lainnya telah menjadi perhatian bersama.

Kemudian, BDF sebagai sebuah institusi juga telah memberikan kesempatan negosiasi.

Kegiatan negosiasi tersebut dapat dilihat dari forum yang telah diselenggarakan. Secara praktis, forum tersebut memberikan kesempatan berbagai negara untuk menyampaikan argumennya serta memberikan komentar terhadap argument dari perwakilan negara lain. Negosiasi terjadi antar satu negara dengan negara lainnya dalam menuju kesepakatan bersama tentang topik yang diangkat.

Sebagai sebuah institusi yang menghadirkan banyak negara, tentu kegiatan negosiasi merupakan hal penting. Dalam hubungan internasional sendiri, negosiasi dilakukan untuk mencapai kepentingan pribadi negara dan kepentingan bersama. Seperti yang telah dipaparkan pada pertemuan BDF I hingga VII, dapat dilihat bahwa masing-masing negara mendapatkan kesempatan untuk bernegosiasi mengenai nilai penting demokrasi yang kemudian menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama.

Dilihat dari nilai demokrasi yang didasarkan pada tiga prinsip Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang digunakan oleh BDF, yakni *peace and security*, *human rights* dan *development* maka pada perannya sebagai penyedia aliran informasi dan negosiasi, prinsip *peace and security* telah dijalankan oleh BDF melalui IPD dalam mengalirkan

informasi di luar agenda forum secara langsung. Dalam hal ini, BDF melalui IPD telah melaksanakan dialog dalam demokratisasi. Kegiatan dialog ini telah menyalurkan informasi serta member ruang untuk bernegosiasi antara negara yang bersangkutan.

Transisi demokrasi yang terjadi di suatu negara tidaklah mudah. Penting untuk melihat berbagai pengalaman negara lain dan mempelajarinya dalam berbagai perspektif. Indonesia sebagai negara yang mendirikan BDF telah berbagi pengalaman seputar transisi pemerintahan yang juga dipelajari dari negara lainnya. Dialog tersebut dilakukan dalam kerangka bilateral oleh Indonesia dan Mesir.

Kesempatan untuk melaksanakan program bersama negara lain telah menjadi peran penting bagi BDF. Indonesia dan Mesir telah melaksanakan dialog seputar transisi demokrasi, termasuk di dalamnya terdapat *workshop* dalam memperkuat demokrasi di kedua negara. *Workshop* yang dilakukan telah menghadirkan berbagai partisipan, yakni terdiri dari pemerintah, penasihat, anggota partai politik, akademisi, media massa, dan organisasi masyarakat sipil (IPD 2020, 10).

Selain Mesir, negara lain yang melaksanakan dialog dengan Indonesia

adalah Myanmar. Dialog tersebut membahas tentang kepemimpinan dan reformasi partai politik. Pada dialog tersebut telah menghasilkan kesepakatan, yakni pertemuan tersebut menyediakan informasi untuk para partisipan dalam melihat isu yang paling menonjol serta tantangan dalam membangun dan mendukung reformasi partai politik di Indonesia dan Myanmar. Selain itu, pertemuan tersebut juga membangun rasa kepercayaan diri dan rasa kebersamaan serta memperkuat komunikasi antar aktor yang terlibat (IPD, 2013).

BDF sebagai sebuah institusi juga telah berperan untuk mengalirkan informasi dan kesempatan negosiasi. Seperti pada pertemuan pertama BDF yang bertepatan “*Building and Consolidating Democracy as Agenda for Asia*”, forum pertama tersebut bertujuan untuk membangun demokrasi dan menyatukan pemikiran negara yang terlibat bahwa demokrasi penting untuk dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa BDF telah hadir dalam memberikan wadah untuk mengalirkan informasi dan kesempatan negosiasi dalam membangun demokrasi.

Di pelaksanaan BDF I juga terdapat kesepakatan bersama bahwa kebebasan informasi merupakan hal yang krusial. Australia telah menjadi salah satu

negara yang berkomit menuntuk menciptakan demokrasi yang efektif dan responsive khususnya dalam melihat tantangan dari kebebasan informasi dalam negara. Australia dalam hal ini menjadi contoh positif bagi negara yang hadir dimana Australia telah mereformasi kebebasan informasi (Bali *Democracy Forum I* 2008, 13). Hal ini tentu menjadi cerminan positif bagi negara yang hadir.

Dilihat dari nilai demokrasi yang didasarkan pada tiga prinsip Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang digunakan oleh BDF, yakni terdiri dari *peace and security*, *human rights* dan *development* maka peran BDF pada poin pertama sebagai penyedia aliran informasi dan kesempatan negosiasi, BDF juga telah memainkan perannya dengan berprinsipkan *development* atau pembangunan. Hal ini didasarkan dari aliran informasi yang diberikan dan kesempatan negosiasi yang dibuka untuk negara yang terlibat agar dapat mengambil poin-poin penting untuk membangun negaranya.

Dilihat dari penyelenggaraan BDF I hingga VII, peran BDF sebagai penyedia aliran informasi dan negosiasi memiliki hambatan tersendiri. Sebagaimana BDF menghadirkan banyak negara di setiap forumnya yang terdiri dari negara berkembang hingga negara maju, maka

cukup sulit untuk meratakan penyebaran aliran informasi dan kesempatan negosiasi.

Jika dilihat dari beberapa penyelenggaraan BDF dari tahun 2008 hingga 2014, tidak semua negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpendapat. Tema yang diangkat juga dilihat tidak terlalu fokus pada satu permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu penyelenggaraan BDF pada BDF pertama. Hal ini terlihat dari penyampaian argument beberapa negara yang menyampaikan permasalahannya. Sri Lanka yang hadir saat itu mengemukakan bahwa permasalahan social sangat krusial, sedangkan Malaysia memfokuskan pada permasalahan senjata pemusnah massal yang dimiliki oleh Irak. Kemudian, Timor Leste sebagai negara kecil yang hadir saat itu menyampaikan bahwa masalah terorisme menjadi masalah yang sangat serius di negaranya. Hal ini tentu membuat tema pertama tidak terlalu memiliki focus permasalahan di Asia Pasifik.

2) Meningkatkan Kemampuan Pemerintah Memonitor Kekuatan Lain dan Mengimplementasikan Komitmennya Sendiri

Sebagaimana Teori Neoliberalisme Institusional bersifat state-sentris, maka memonitor kekuatan lain merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan sebuah negara. Kekuatan lain yang muncul

dapat dilihat sebagai ancaman ataupun kesempatan dalam mengembangkan negaranya. Melalui BDF yang merupakan institusi milik negara, negara yang hadir mendapatkan kesempatan pertukaran informasi dan berbagi pengalaman sehingga dapat dilihat sejauh mana Negara tersebut memiliki keunggulan di dalamnya. Kemampuan negara dalam membuat komitmen yang dapat dipercaya menjadi hal yang sangat penting dan berada di urutan pertama (Jackson dan Sorensen 2005, 158).

Dari aliran informasi yang telah didapatkan, maka BDF sebagai sebuah institusi dapat mengurangi rasa takut dari negara anggota satu sama lain. Kerjasama yang dijalin antara negara-negara di kawasan telah menjadi alat dalam mengurangi ketidakpercayaan dan rasa takut antar negara.

Setiap negara yang hadir tidaklah memiliki nilai yang sama. Perbedaan nilai yang dianut tentu disesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Namun, melalui BDF, komitmen bersama dalam menciptakan kawasan yang demokratis berusaha dibangun dan ditumbuh kembangkan oleh negara yang hadir. Komitmen bersama yang telah diciptakan tentu harus berjalan beriringan dengan komitmen negara tersebut secara pribadi.

Dari forum yang telah diselenggarakan, BDF dapat menjadi pemberi arah negara dalam mengimplementasikan komitmennya sendiri melalui dialog yang telah dilakukan.

Dalam konsep kedamaian demokratis, dikatakan bahwa pemerintah yang menjalankan tugasnya secara penuh dengan tanggungjawab, maka akan enggan untuk melakukan perang. Dalam sistem yang demokratis, rakyat akan berusaha untuk mendesak negaranya agar dapat menghindari perang karena akan membebani dengan harga yang sangat besar (Ethridge dan Handelman 2016, 775). Hal ini dapat dijadikan dasar bahwa negara perlu untuk memonitor kekuatan lain yang ada di sekitarnya. Rakyat secara umum memilih untuk hidup dalam negara demokratis yang damai sehingga negara harus dapat mengimplementasikan berbagai komitmennya dalam menjalankan negaranya yang didasarkan pada kepentingan bersama rakyat banyak.

Institusi dalam hal ini juga memiliki arti penting bagi keuntungan aktor lainnya. Keuntungan tersebut dapat berupa informasi, transparansi hingga *monitoring* (Nuraenidkk, 2020). BDF sebagai institusi yang hadir dan terbuka terhadap berbagai aliran informasi telah memainkan perannya dalam memonitor

negara yang hadir di dalamnya. Dari informasi yang dibagikan dari satu negara ke negara lain, maka aktor yang terlibat dapat memonitor kekuatan yang hadir untuk dapat dijadikan sebagai perhatian bersama dalam menciptakan kawasan yang demokratis.

Salah satu program nyata dalam memonitor kekuatan lain adalah melalui kegiatan kunjungan dalam pemilu di negara lain. Program tersebut dinamai dengan *Election Visit Program* dan telah dilaksanakan di dua negara, yakni Mesir dan Jepang. Program ini merupakan sub program dari *designing and consolidating democratic peace institutions*.

Pelaksanaan program ini berdasarkan dari undangan oleh *National Democratic Institute* untuk dapat bergabung secara langsung dalam misi pengamatan internasional dalam pemilihan parlemen di Mesir. Para delegasi dikerahkan di Provinsi El Minya dimana para pemimpin partai politik dan aktivis masyarakat sipil dapat mengamati pemungutan suara pada hari pemilihan. Setelah itu, para delegasi kembali ke Kairo untuk berbagi hasil temuan mereka (IPD 2012, 14). Kemudian, *Election Visit Program (EVP)* juga dilaksanakan di Jepang yang didukung oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri

Luar Negeri Jepang. EVP tersebut dilakukan untuk pemilihan walikota di Kota Niiza, Jepang (IPD 2012, 15). Kegiatan ini telah membantu dalam melihat proses demokrasi di negara lain.

Peran BDF untuk memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri juga tercermin dari pelaksanaan BDF yang dalam hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan BDF II. Pada sesi debat umum, Jepang sebagai salah satu negara yang hadir menyatakan bahwa masih terjadi rasa ketidakpercayaan dan konfrontasi di Asia Timur Laut. Hal tersebut berkenaan dengan keberadaan nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara. Menurut Jepang, denuklirisasi harus dilakukan untuk menjaga kestabilan kawasan. Forum juga berharap bahwa Korea Utara dapat lebih terbuka dengan komunitas internasional.

Selain itu, Mongolia sebagai negara yang hadir juga turut mempromosikan dalam memperkuat masyarakat sipil sebagai bagian penting dari demokrasi. Dalam hal ini, masyarakat sipil menjadi bagian penting dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah yang memperkuat akses masyarakat terhadap informasi dan dokumen. Dalam demokrasi, kebebasan dalam mengakses informasi merupakan hal yang penting dan

tentunya harus didukung dengan aturan hukum dan *good governance* (Bali Democracy Forum IV 2011, 4). *Good governance* yang didefinisikan oleh World Bank merujuk sebagai suatu penyelenggaraan pengaturan pembangunan yang bersifat solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip yang terdapat di dalam demokrasi (Kharisma 2014, 1). Penyelenggaraan ini tentu berdasarkan kepentingan bersama dan mengedepankan pada prinsip demokrasi yang menggunakan masyarakat sebagai elemen yang penting.

Kemudian dalam BDF V, menurut Perdana Menteri Turki, tatanan global pada saat itu tidak mencerminkan pada nilai kesetaraan antar negara. Hal tersebut dilihat dari adanya keberadaan 5 negara yang memiliki *privilege* melaluhak veto dalam Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Hal tersebut telah menghambat upaya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional (Bali Democracy Forum V 2012, 6). Adanya pendapat ini telah memainkan peran BDF dalam memonitor kekuatan lain. Dalam hal ini, keberadaan negara yang memiliki hak veto harus ditinjau lebih dalam agar tidak menghambat upaya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Berdasarkan demokrasi BDF yang berpegang pada 3 prinsip PBB, makaperan BDF untuk memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya secara khusus telah menerapkan prinsip *peace and security* yang kemudian berhubungan dengan prinsip *human rights*. Prinsip perdamaian dan keamanan terlihat dari adanya kegiatan *Election Visit Program* dan penyampaian pendapat mengenai keberadaan nuklir milik Korea Utara yang dapat memengaruhi perdamaian dan keamanan kawasan. Hadirnya BDF telah member kesempatan bagi negara untuk dapat memonitor kekuatan yang ada agar kestabilan dapat tercipta yang kemudian akan menjunjung tinggi hak asasi manusia (*human rights*). *Good governance* yang didasarkan pada prinsip demokrasi juga dianggap penting dalam kebebasan informasi dan akses terhadap informasi tersebut.

Negara dinilai harus dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini juga dapat diseimbangkan dengan kemampuan dalam menggunakan teknologi sehingga dapat selalu memonitori serta mengevaluasi pergerakan demokrasi dan berbagai institusi yang terlibat di dalamnya.

Tantangan dari pelaksanaan peran ke dua ini adalah adanya negara yang

cukup tertutup dengan dunia internasional. Contoh nyatanya adalah Korea Utara. Negara tersebut memang sangat tertutup dan memang berada di urutan terbawah dalam indeks demokrasi menurut EIU. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk memonitor kekuatan negara tersebut. Selain itu, keterbukaan informasi yang ada tentu menjadi tantangan tersendiri bagi negara yang bersangkutan dimana adanya kemungkinan terjadi misinformasi yang dapat berujung pada ketidakstabilan. Kemajuan teknologi tentu menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara yang masih berkembang sehingga ini menjadi catatan bersama dalam memajukan demokrasi. Namun, secara umum negara-negara yang hadir telah berkomitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan bersama mengenai pembangunan demokrasi di kawasan.

3) Memperkuat Harapan yang Muncul tentang Kesolidan dan Kesepakatan Internasional

Krisis keamanan merupakan salah satu hal yang cukup serius dialami oleh negara di Asia Pasifik. Krisis keamanan besar yang salah satunya adalah aksi terorisme telah dihadapi oleh beberapa negara di Asia Pasifik dan telah menjadi perhatian khusus. Krisis keamanan sendiri

merupakan momen yang berbahaya bagi keberadaan demokrasi. Bahkan krisis tersebut dapat dilakukan oleh negara yang dipimpin oleh pemimpin yang bias berbuat apapun di luar konteks kepentingan bersama (Levitsky dan Ziblatt 2019, 167). BDF sebagai sebuah institusi dan wadah bagi kepentingan banyak negara di kawasan Asia Pasifik sudah semestinya dapat menjadi institusi yang membawa harapan bagi perkembangan demokrasi yang lebih baik.

Sebagai sebuah institusi internasional, BDF hadir sebagai institusi yang membawa harapan besar bagi negara anggotanya. Berbagai tantangan telah dihadapi oleh berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Melalui BDF pula tantangan tersebut didiskusikan tentang bagaimana caranya untuk menghadapinya secara bersama. Kesolidan dalam kawasan menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Masing-masing negara yang hadir harus dapat saling membahu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik.

Sejak BDF hadir untuk pertama kalinya, negara yang terlibat telah menaruh harapan yang besar bagi kemajuan demokrasi di Asia Pasifik. BDF sudah semestinya hadir dalam memperkuat kembali harapan yang runtuh akibat dari

berbagai ancaman demokrasi yang dihadapi oleh masing-masing negara. Kesepakatan internasional yang dihasilkan oleh BDF menjadi langkah penting dalam merealisasikan harapan yang muncul tersebut.

Salah satu program nyata dari BDF yang diimplementasikan melalui IPD adalah program *“South-South Dialogue Course between IPD and the American University in Cairo”*. Dialog tersebut bertujuan untuk menawarkan perspektif yang berbeda dan baru dengan pendekatan untuk mengeksplor konteks sosial, ekonomi, politik and budayadari Indonesia dan Mesir. Pada tahun 2014, dialog tersebut berfokus pada Islam, negara dan politik yang dibandingkan pada Indonesia dan Mesir. Dalam dialog tersebut telah melibatkan mahasiswa dari *American University of Cairo* dan Universitas Udayana (IPD *Annual Report* 2014, 72). Dialog yang dilakukan tersebut merupakan salah satu peran BDF dalam memperkuat rasa solidaritas di kawasan yang dalam hal ini berkaitan dengan kondisi social budaya Indonesia dan Mesir sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Hal ini sejalan dengan BDF yang bersifat inklusif dan memegang teguh pada sifat pluralistik.

Selain itu, dialog untuk membangun rasa solidaritas juga dibangun oleh Indonesia sebagai pendiri BDF yang dilakukan dengan Myanmar sebagai salah satu negara yang belumstabil di kawasan terkait kondisi internal negara tersebut. Indonesia dan Myanmar aktif melakukan dialog untuk membangun demokrasi dan perdamaian yang berkelanjutan di Myanmar. Dialog tersebut menghasilkan kesepakatan untuk secara signifikan membangun rasa kepercayaan diri dan kebersamaan dengan berbagai institusi yang berkaitan dengan proses perdamaian di Myanmar. Memperkuat komunikasi juga menjadi kesepakatan penting dalam proses dialog tersebut. Hal ini menjadi krusial bagi Myanmar dalam proses reformasi politik di dalam negara tersebut (IPD *Annual Report* 2014, 2).

Gambar 2 Penyelenggaraan Dialog Indonesia-Myanmar



(Sumber: IPD *Annual Report*, 2014)

Keterbukaan Myanmar dalam melibatkan negara lain pada proses reformasi politik di negaranya telah membangun harapan bersama dalam

menciptakan stabilitas di kawasan. Permasalahan yang terjadi di Myanmar telah menjadi perhatian bersama di kawasan sejak dulu hingga kini. Melalui BDF, rasa solidaritas dapat dibangun secara bersama untuk menghadapi masalah yang ada. Rasa solidaritas tersebut tentu telah membangun harapan bersama untuk menciptakan kawasan yang lebih demokratis melalui berbagai pembangunan bersama.

Pada berbagai pertemuan BDF pula, forum menyepakati bahwa negara merupakan pihak yang penting dalam menciptakan demokrasi, khususnya dalam merespon aspirasi publik. Negara harus bersikap solutif terhadap permasalahan yang dihadapi. Salah satu masalah yang cukup disoroti dalam forum ini adalah masalah pendidikan. Australia dalam pertemuan BDF V (2012,2) berpendapat bahwa perempuan seringkali dikesampingkan perannya. Hal ini berlawanan dengan hak asasi manusia sehingga forum berusaha diyakini bahwa hak asasi pada perempuan harus ditegakan karena pada dasarnya perempuan juga memiliki peran yang setara dan dapat berkontribusi secara positif dalam pemajuan demokrasi. Isu wanita yang disuarakan oleh Australia ini telah memperkuat peran BDF dalam

memperkuat rasa solidaritas antar Negara dalam memajukan peran perempuan di berbagai aspek yang dapat member kontribusi positif pada demokrasi.

Solidaritas antar Negara menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan bersama. Kesepakatan internasional yang telah dihasilkan melalui BDF menjadi titik terang bagi kerjasama yang dilakukan dalam membangun demokrasi yang lebih baik di kawasan Asia Pasifik.

Sebagai sebuah kawasan yang cukup luas, Asia Pasifik sendiri terdiri dari negara berkembang hingga negara maju. Pelaksanaan BDF I hingga VII telah menghadirkan berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda-beda pula. Dari forum yang telah diselenggarakan, dapat dilihat bahwasanya negara kecil seperti Timor Leste cenderung meminta dukungan dalam mengembangkan negaranya yang masih harus menghadapi berbagai tantangan. Kondisi negara yang masih belum stabil telah membawa dampak bagi kurang demokratisnya negara tersebut. Kemiskinan dan masalah lainnya telah menjadi tantangan yang cukup berat bagi negara tersebut. Maka dari itu, peranan BDF sebagai sebuah institusi telah berperan penting khususnya bagi negara

kecil untuk dapat menciptakan kondisi yang lebih stabil.

Kesepakatan internasional yang diciptakan melalui BDF merupakan kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan dan kepentingan negara yang terlibat. BDF sebagai institusi telah memainkan perannya dalam menciptakan kesepakatan internasional. Dalam hal ini, kesepakatan internasional tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk, yakni kesepakatan bersama tentang keberadaan demokrasi yang penting di kawasan hingga kegiatan yang diimplementasikan secara nyata untuk memajukan demokrasi di kawasan Asia Pasifik.

Berdasarkan demokrasi yang dianut oleh BDF yang didasarkan oleh tiga pilar PBB, pada perannya yang ketigaini telah mengedepankan prinsip *peace and security* dan *development*. Rasa solidaritas yang berusaha dibangun oleh BDF tentu berpegang pada prinsip perdamaian dan keamanan dimana perdamaian dan keamanan merupakan aspek yang penting dalam memupuk rasa kebersamaan dan solidaritas antar negara. Prinsip pembangunan juga telah diterapkan pada peran ke tiga ini dimana berbagai program yang dilakukan merupakan bagian dari pembangunan

demokrasi yang lebih baik di kawasan Asia Pasifik.

D. Simpulan

Melihat berbagai masalah yang telah dipaparkan, peneliti melihat bahwasanya cukup besar peran yang diharapkan pada BDF sebagai institusi. Banyaknya masalah yang dihadapi oleh berbagai negara tersebut, maka peneliti melihat bahwa BDF berperan sebagai wadah yang berusaha untuk menanganinya secara bersama. Dalam Teori Neoliberalisme Institusional milik Robert O. Keohane (1989), terdapat tiga peran utama institusi, yakni menyediakan aliran informasi dan kesempatan negosiasi, meningkatkan kemampuan pemerintah untuk dapat memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri serta memperkuat harapan yang muncul tentang kesolidan dan kesepakatan internasional.

Secara garis besar, BDF telah melakukan tiga peran utama tersebut. BDF telah hadir untuk menyalurkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh negara-negara yang bersangkutan dalam tujuan untuk membangun demokrasi secara bersama. Negosiasi juga menjadi kegiatan penting dalam forum yang dilakukan tersebut. Dari penyelenggaraan BDF setiap tahunnya, negara-negara yang hadir

mendapatkan informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam memonitor kekuatan lain dan dapat mengimplementasikan komitmennya sendiri.

Sebagai sebuah institusi juga, BDF tentu berperan penting dalam menciptakan harapan dalam rasa solidaritas bersama di kawasan serta menciptakan berbagai kesepakatan internasional. Kesepakatan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan bersama yang kemudian dituangkan dalam berbagai agenda praktis bagi negara-negara yang bersangkutan. Ketiga peran tersebut dilaksanakan melalui forum tahunan dan juga berbagai program diluar forum tersebut. Dalam menjalankan perannya, BDF berpegang pada aspek demokrasi yang tetuang pada 3 prinsip PBB, yakni *peace and security*, *human rights* dan juga *development*.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian ini, yaitu:

1. Melihat masalah demokrasi yang cukup luas tersebut, alangkah baiknya jika BDF dapat secara khusus mengadakan pertemuan tahunannya dengan membahas masalah yang benar-benar spesifik sehingga dapat ditanganis secara bersama dan secara nyata. Hal ini menjadi

masukannya karena peneliti melihat bahwasanya tema yang diangkat cukup luas sehingga tidak terlalu spesifik membahas masalah yang sedang terjadi sedangkan partisipan yang hadir terdiri dari banyak negara.

2. Terkait dengan *website* resmi yang dimiliki oleh BDF yang terlihat kurang *update*, peneliti menyarankan bahwa BDF perlu *update* informasi terkini secara lengkap tentang hal-hal dan program yang telah dilakukan. Hal ini akan dapat memperkuat peran BDF sebagai penyedia aliran informasi..

Referensi

Buku:

- Ethridge, M.E. dan Handelman, Howard. (2016). *Politik dalam Dunia yang Berubah*. Bandung: Nusa Media.
- Jackson, Robert dan Sorensen, Georg. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keohane, Robert. (1989). *Neoliberal Institutionalism: A Perspective on World Politics. International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory*, Boulder, CO, San Francisco, CA and London: Westview Press, 1–20.
- Levitsky, Steven dan Ziblatt, Daniel. (2019). *Bagaimana Demokrasi Mati*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nuraeni, Deasy Silvy, dan Arifik Sudirman. (2010). *Regionalisme dalam Studi Hubungan I*

internasional.
PustakaPelajar.

Yogyakarta:

Pluralistic Society". Speeches and Proceedings.

Sugiyono. (2017).
Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta.

Economist Intelligence Unit. 2008. *"The Economist Intelligence Unit's Index of Democracy 2008"*

Institute for Peace and Democracy (IPD). 2013. *Comprehensice Program Report 2012.*

Institute for Peace and Democracy (IPD). 2014. *Comprehensice Program Report 2012.*

Setkab.go.id. 2014. *Opening Statement By Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, President RI in Bali Democracy Forum VII.* Diakses pada 20 Agustus 2021.

UK.Gov. 2015. *Statement by Ambassador Mark Lyall Grant of the UK Mission to the UN.*

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

Prasetyo, Alex. (2018). *Kebijakan Politik Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2009.* Skripsi, Universitas Jember.

Rahman, Vanny El. (2017). *"Pengaruh Bali Democracy Forum Terhadap Transisi Demokrasi Myanmar Periode 2012-2014"*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta.

Internet (artikel dalam jurnal online):

Anggraeni, Yolla dan Indrawati. (2020). *Diplomasi Publik Indonesia Melalui Bali Democracy Forum Sebagai Bagian Dari Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia.* ISSN 2541-318X. (Online)
(<http://journal.uta45jakarta.ac.id/diakses> 1 Februari 2021)

Dokumen resmi:

Bali Democracy Forum. 2018. *"Bali Democracy Forum"*.

Bali Democracy Forum I. 2008. *"Building and Consolidating Democracy: A Strategig Agenda for Asia". Speeches and Proceedings.*

Bali Democracy Forum II. 2009. *"Promoting Synergy between Democracy and Development in Asia: Prospect for Regional Cooperation". Speeches and Proceedings.*

Bali Democracy Forum III. 2010. *"Democracy and the Promotion of Peace and Stability". Speeches and Proceedings.*

Bali Democracy Forum IV. 2011. *"Enchancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices". Speeches and Proceedings.*

Bali Democracy Forum V. 2012. *"Advancing Democratic Principles at the Global Setting: How Democratic Global Governance Contributes to International Peace and Security, Economic Development, and Effective Enjoyment of Human Rights". Speeches and Proceedings.*

Bali Democracy Forum VI. 2013. *"Consolidating Democracy in*

Kharisma, Bayu. (2014). *Good Governance* sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). Jurnal Buletin Studi Ekonomi (Online), Vol. 19, No.1. (<https://media.neliti.com>, diakses 10 Oktober 2021)

Education, and Humanities Research (Online), Volume 241
DOI:10.2991/icosaps-18.2018.15(<http://researchgate.net/>, diakses 18 Februari 2021)

Tulisan/berita dalam Koran

Lie, Wilyam dan Siagian, Muhnizar. 2018. "Indonesian Interests in Bali Democracy Forum (BDF)". *Journal of Advances of Social Science*,

Antaranews. 2014. *Bali Democracy Forum VII Resmi Ditutup*, hlm. 1.

